

---

# KALDERA EGALITER RELIGIUS MEREKONSTRUKSI PAHAM KEAGAMAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KOTA MALANG JAWA TIMUR

## ***KALDERA EGALITER RELIGIUS RECONSTRUCTS WOMEN'S RELIGIOUS UNDERSTANDING IN HIGH EDUCATION INSTITUTIONS IN MALANG JAWA TIMUR CITY***

---

**ABD. RAHIM RAZAQ<sup>1</sup> DAN UMIARSO<sup>2</sup>**

**Abd. Rahim Razaq<sup>1</sup> dan  
Umiarso<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>S3 PAI Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259,  
Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota  
Makassar, Sulawesi Selatan  
90221

Email: rahim.razaq@  
unismuh.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah  
Malang  
Jln. Raya Tlogomas No.  
246 Tlogomas, Babatan,  
Tegalgondo, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur  
65144

Email: umiarso@umm.ac.id

Naskah diterima:  
28 Mei 2020  
Revisi: 9 Juni-30 Juni 2020  
Disetujui: 12 Juli 2020

### **Abstract**

*This article reflects the reconstruction of the religious understanding of egalitarian relations between men and women through the education system in the colleges of Malang. This research was carried out in two universities namely the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim and the University of Muhammadiyah Malang (UMM) which continued to build egalitarian education patterns. Hence, this research focuses on the reality of egalitarian education and the impact on the development of humanist, moderate, and egalitarian religious understandings in the midst of the academic community. From this study, this research deduces that religious understanding about women can grow from the social reality of education. The emergence of the education system is based on an integrative value between the dimensions of empirical reality (verses of *kauniyah*) and normative revelations (Al-Qur'an and hadis (verses of *qauiyyah*)). These integrative values in the higher education system are said by researchers to be a caldera of religious egalitarian. The pattern of humanist efforts through egalitarian education system encourage the existence of educational institutions that can elevate the dignity of women in the mainstreaming of religious understanding. In fact, it was able to reproduce a more progressive and moderate academic culture.*

**Keywords:** Reconstruction of Religious Concepts, Religious Egalitarian Caldera, Islamic Higher Education Institution

### **Abstrak**

Artikel ini mengurai tentang rekonstruksi paham keagamaan relasi egaliter antara laki-laki dan perempuan melalui sistem pendidikan di perguruan tinggi Kota Malang. Riset ini dilaksanakan di dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang terus membangun pola pendidikan egaliter. Karenanya, riset ini fokus pada realitas kependidikan egaliter tersebut serta dampak pada tumbuh kembangnya paham keagamaan yang humanis, moderat, dan egaliter di tengah sivitas akademika. Dari telaah tersebut, riset ini menyimpulkan bahwa paham keagamaan tentang keperempuanan bisa tumbuh dari realitas sosial kependidikan. Munculnya sistem pendidikan tersebut dilandasi oleh nilai integratif antara dimensi realitas empirik (*ayat kauniyah*) dan wahyu normatif (Al-Qur'an dan hadis (*ayat qauiyyah*)). Nilai-nilai integratif dalam sistem pendidikan tinggi inilah oleh peneliti dikatakan sebagai kaldera egaliter religius. Upaya humanis melalui pola sistem pendidikan egaliter mendorong adanya lembaga pendidikan yang bisa mengangkat harkat derajat perempuan dalam mainstream paham keagamaan. Bahkan ia mampu mereproduksi kultur akademik yang lebih progresif dan moderat.

**Kata Kunci :** Rekonstruksi Konsep Keberagamaan, Kaldera Egaliter Religius, Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi

## PENDAHULUAN

Sampai saat ini masih terdapat anggapan, perempuan adalah makhluk yang memiliki kekurangan dalam kemampuan akal dan agama (Khattab, 2018; Abdullah & Sharoja, 2018; Suryorini, 2012; Kirsoglu, 2004) serta lekat dengan kejahatan (Eastwood, 2018). Bahkan di lembaga pendidikan Islam pun stigma tersebut sangat lekat, sebagaimana hasil riset Rahman (2017), Mustaqim (2014), atau juga riset dari Kull (2012). Kenyataan ini muncul di Kota Malang, Jawa Timur akibat adanya pemahaman yang kurang proporsional dalam memahami *naṣ-naṣ* normatif keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, atau kitab-kitab klasik. Atau memang dikonstruksi oleh komunitas tertentu yang menginginkan adanya ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan di atas dasar legitimasi *naṣ-naṣ* normatif Islam. Kondisi inilah yang mendorong Okon (2013) meneliti posisi perempuan dalam Islam, dan ia menyimpulkan, bahwa dibandingkan dengan agama-agama lain, Islam benar-benar melestarikan dan membela hak-hak perempuan. Hal ini dikuatkan juga dengan riset historis Adinugraha, dkk (2018) yang menyimpulkan, bahwa pada periode klasik (periode nabi) dan pertengahan, perempuan telah memiliki peran penting di berbagai dimensi kehidupan umat. Karenanya, penafsiran atas agama memiliki kecenderungan melestarikan relasi kesetaraan, seperti kesimpulan riset Glas, dkk (2018). Dan juga bisa dikatakan, seperti riset Darwin (2018) atau Aune (2014), antara gender dan agama saling terkait.

Rekonstruksi paham keagamaan yang timpang tersebut pun diupayakan mampu menyelaraskan pesan humanis-egaliter. Sebagaimana dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang (UINM) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui pola pendidikan yang dikembangkannya. Dua perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini melepaskan sekat-sekat relasi timpang antara mahasiswa dan mahasiswi. Implikasinya, ruang-ruang konstruktif terbuka lebar yang mendorong terciptanya relasi edukatif egaliter dan humanis. Artinya, sistem pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman keagamaan sivitas akademika dan memunculkan iklim edukasi yang kondusif. Berbagai riset seperti riset Maksum (2015), Zuhriy (2011), Fauziah & Rohman (2012), atau Susanto (2006) memunculkan pernyataan yang sama bahwa sistem kependidikan memiliki urgensi terhadap tata perilaku sivitas akademika.

Lazim apabila konstruksi sistem pendidikan di UINM, yang mengacu pada pemikiran keagamaan Islam secara makro (nasional-religius), dan UMM, yang berideologi Islam, terus menerus bermetamorfosis ke pendidikan humanis. Dua Perguruan Tinggi (PT) ini menjalankan sistem pendidikan melalui prinsip egaliter dengan memberikan ruang kebebasan akademik tanpa membedakan jenis kelamin dan gender. Kedua PT ini juga mengedepankan pembentukan paham keagamaan moderat dengan menafsirkan teks-teks keagamaan berbasis kesadaran gender yang non-diskriminasi. Paham keagamaan yang ditelaah adalah penafsiran teks-teks normatif Al-Qur'an dan hadis tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama nilai normatif keperempuanan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan deskripsi tersebut, riset ini memfokuskan pada pola konstruksi realitas pendidikan egaliter pada tumbuh kembangnya pemahaman keagamaan yang humanis, moderat, dan egaliter di tengah sivitas akademika. Pertanyaan yang muncul pada fokus riset ini adalah, bagaimana pola konstruksi pendidikan egaliter di UINM dan UMM serta dampaknya hingga bisa mewujudkan paham keagamaan yang humanis, moderat, dan egaliter? Pertanyaan inilah yang hendak dijawab oleh peneliti secara empiris-rasionalistik berdasarkan pada dasar riset ilmiah. Karenanya, peneliti memilih pendekatan riset kualitatif dengan jenis riset studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman (tahun rujukan).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Relasi Egaliter dalam Bingkai Kependidikan**

Relasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan akan bersifat konstruktif jika ia dibingkai oleh kesadaran keagamaan. Namun akan menjadi persoalan, ketika pemahaman sivitas akademika terhadap *nas-nas* keagamaan tersebut bermetamorfosis menjadi kebenaran yang diterima tanpa sikap kritis. Saat itulah pintu-pintu “ijtihad” tentang ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan akan tertutup dan “haram” untuk dibuka kembali. Pun begitu di UINM dan UMM, sivitas akademika memiliki ketiaatan yang kuat pada nilai-nilai normatif Islam untuk bersikap yang

sama. Terlebih lagi ketika budaya patriarki menjadi sistem budaya yang telah mendarah daging sebagaimana yang terjadi di Sebagian wilayah di Indonesia, maka ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan seakan-akan menjadi suatu fakta yang tidak bisa “dipertanyakan” kembali (tertutup). Karenanya, UINM dan UMM membangun iklim akademik yang kondusif dan demokratis agar bisa menopang relasi sosial bagi sivitas akademika. Salah satunya melalui kajian-kajian keperempuanan dalam berbagai perspektif oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) di UMM dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di UINM.

Memang persoalan sistem kependidikan yang berkelindan dengan paham keagamaan sangat kompleks untuk dilihat batasan-batasannya. Persoalan ini pun masih menyisakan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang egaliter di tengah masyarakat Kota Malang. Secara umum di masyarakat, posisi perempuan ditempatkan pada titik subordinat dalam sosio-linguistik (Kuntjara, 2003), militer (Umar, 1999), atau kompilasi hukum agama (Hadi, 2014). Hasil riset Cholil (2017) menyebutkan, posisi perempuan di daerah Jawa Timur berada pada posisi subordinat; bahkan budaya patriarki terlegitimasi oleh realitas keagamaan. Dengan demikian, iklim (budaya) lembaga pendidikan Islam perlu dibangun berdasarkan pada landasan etik-normatif yang bebas dari penafsiran intoleransi, dominatif atau bias gender.

Pemahaman yang demikian, terutama yang muncul dari pesan teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) sangat mendesak untuk direkonstruksi atau didekonstruksi. Agar ia mampu menemukan pesan-pesan keislaman yang hakiki, normatif, dan universal, seperti

persamaan, persaudaraan, kesetaraan dan keadilan gender. Upaya ini pun sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian komunitas perempuan, sebut saja Wadud (2013) atau Arimbi (2009) yang mempertanyakan kembali interpretasi *naṣ-naṣ* normatif Islam. Hasilnya pun perlu diterjemahkan pada atribut perilaku kemasyarakatan umat sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan; atau perlu menjadi gerakan kultural. Sedangkan di UINM dan UMM, budaya organisasi menjadi tempat bergumulnya pesan-pesan normatif keagamaan dalam setiap interaksi sosial akademik. Wajar apabila mahasiswa kedua PT tersebut mempunyai konstruksi etika "pergaulan" egaliter dan toleran, sehingga ciri khas budaya akademik mereka tidak lepas dari nilai keagamaan ramah perempuan.

Tidak bisa dipungkiri atribut perilaku sosial mahasiswa UINM dan UMM sangat bergantung pada latar budaya serta interpretasi teks-teks keagamaan. Begitu pula masyarakat yang memposisikan perempuan di tempat marginal disebabkan konstruksi teologis yang kurang arif dalam menafsirkan dalil-dalil agama. Bahkan Zulaiha (2018) dalam risetnya menyatakan, dalil normatif agama sangat rentan untuk ditafsirkan bias gender atau cenderung disalahtafsirkan melalui pendekatan literalis-skriptual. Padahal posisi kesetaraan gender semakin subur jika tafsir terhadap teks-teks normatif keagamaan terdapat relasi kuasa-pengetahuan yang hasilnya berupaya membangun kehidupan sesuai dengan asa (cita) penguasa (Purwanto, 2019). Pada ranah ini, posisi teks keagamaan menjadi sentral untuk terciptanya relasi egaliter laki-laki dan perempuan termasuk di PT.

Jelasnya, *naṣ-naṣ* normatif Islam bersifat sakral, pasti benar, dan abadi, maka perlu

disimak untuk di tengok ulang konstruksi penafsiran terhadap teks tersebut yang plural dan memiliki kerelatifan kebenaran. Teks suci memiliki kebenaran yang pasti, tetapi penafsirannya memiliki kebenaran relatif. Secara tegas dinyatakan, dalam tafsir tidak ada ruang bagi perkiraan; tidak ada ruang untuk interpretasi berdasarkan pada pemahaman subjektif, atau yang hanya didasarkan kepada ide tentang relativisme historis (Zarkasyi, 2016). Pada ranah inilah, ada upaya dari para ulama masa kini yang melakukan interpretasi ulang terhadap tafsir-tafsir abad pertengahan (Ramli, dkk., 2018).

Nyatanya UINM dan UMM telah membangun pemahaman kritis terhadap teks-teks keagamaan yang bebas dari bias-bias ketimpangan gender. Mereka melakukan upaya rekonstruksi terhadap pemahaman gender dengan mengadakan kajian-kajian kritis berupa seminar, lokakarya, simposium, maupun sharing tulisan artikel jurnal. Usaha memahami Al-Qur'an dan hadis tentang keperempuanan pun tidak dilepaskan dari orientasi kelembagaan pendidikan. Karenanya, teks-teks keagamaan diposisikan sebagai informasi normatif dan muncul dalam mindset sivitas akademika UINM dan UMM. Di satu sisi, mereka membuka interaksi edukasi yang melampaui sekat bias gender seperti dalam etika keberagamaan. Contohnya, peraturan akademik dirancang tanpa membedakan mahasiswa dan mahasiswi; membangun persepsi kesetaraan memasuki peluang-peluang akademik di dalam maupun luar kampus; atau kajian-kajian tafsir kontemporer untuk merekonstruksi pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu gender. Karenanya, di UINM dan UMM sangat mudah ditemui mahasiswi masuk ke fakultas teknik atau

eksakta -yang dipersepsikan sebagai fakultas yang mengkaji disiplin ilmu untuk laki-laki semata.

Asumsi dan relasi timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Jawa Timur hakikatnya akibat dari budaya patriarki yang dipertahankan. Melalui sistem pendidikan, UINM dan UMM melakukan “pendobrakan” terhadap sistem patriarki. Hal ini dimaksudkan mentransformasi sosio-kultural dan sosio-agama masyarakat dari PT. Rentetan transformasi skala mikro ke makro ini, imbasnya memunculkan pemahaman komprehensif di masyarakat tentang keagamaan yang egaliter. Dalam sistem pendidikan PT digambarkan secara gamblang melalui praktik kependidikan yang harmonis non-diskriminatif. Sistem pendidikan yang diterapkan pada UINM dan UMM dinyatakan sebagai sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam (Al-Qur'an dan hadis). Karenanya, antara sistem pendidikan yang membingkai relasi egaliter terintegrasi dengan hasil interpretasi teks-teks keagamaan dan diterjemahkan dalam program kependidikan.

Artinya, UINM dan UMM membebaskan dirinya dari belenggu pendidikan diskriminatif. Mereka menyatakan dirinya sebagai PT egaliter; asumsinya ia menyelenggarakan sistem pendidikan yang terbebas dari ketidakadilan gender dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai humanis, egaliter, dan berkeadilan. Karenanya, UINM dan UMM memiliki sifat keumuman yang basisnya pada realitas historis dan retorik; yaitu realitas yang terjadi dan bersifat manifes, serta realitas yang dituturkan oleh sivitas akademika secara latent. Lazim jika postulasi yang melekat pada dua PT tersebut adalah penyelenggara sistem pendidikan Islam yang mengandung

makna konsep nilai universal, seperti dalam proses transformasi kultural bersifat kesemestaan. Hal ini muncul disebabkan sistem pendidikan membawa nilai keadilan yang menuntun pada kesejarahan posisi laki-laki dan perempuan. Bahkan mampu menumbuhkan nilai-nilai normatif relasi mahasiswa dan mahasiswi yang ditumbuhkan dari nilai otentisitas doktrin Islam.

Menariknya, sivitas akademika UINM dan UMM mengarahkan diri mereka ke pertautan integratif antara sistem pendidikan dengan nilai religius-filosofis. Tanpa kesatuan nilai, sistem pendidikan relatif kurang memiliki efektivitas mewujudkan misi mulianya. Seperti riset Umiarso (2019) yang menyimpulkan, bahwa dalam membentuk karakter di lembaga pendidikan perlu ada kesatuan nilai yaitu usaha mengintegrasikan nilai filosofis, religius, serta sosio-religius-filosofis. Ini berarti, sistem pendidikan yang terintegrasi dengan nilai filosofis-humanis egaliter terbalut hasil penafsiran keagamaan akan menghasilkan tindakan non-diskriminatif. Oleh karenanya, nilai legitimasi normatif keagamaan sebagai dasar filosofis dan inspiratif bisa mempengaruhi orientasi dan tindakan egaliter sivitas akademika.

### **Interpretasi Egaliter Nuansa Kependidikan: Hadis “Keperempuanan”**

Salah satu ciri penyelenggaraan sistem pendidikan berbasis Islam adalah menggantungkan teori dan pengelolaannya pada Al-Qur'an dan hadis. Seperti UINM dan UMM juga menyesuaikan dengan aturan dan tuntunan normatif tersebut. Mereka tidak melepaskan kebebasan edukasi terhadap sivitas akademika tanpa

nilai dan norma seperti lembaga pendidikan sekuler. Teks-teks keagamaan menginspirasi sistem tata kelola UINM dan UMM, dan memposisikan hadis sebagai penjelas ketika menerjemahkan Al-Qur'an secara operasional yang sarat makna. Karenanya, teks-teks hadis menempati posisi krusial dalam menentukan pandangannya terhadap perempuan. Mereka menganggap, hadis ada kalanya menerangkan tentang posisi, esensi, dan kiprah perempuan lebih konkret dan tidak memerlukan interpretasi lainnya. Akhirnya, hadis menjadi legitimasi terhadap relasi laki-laki dan perempuan, walaupun di masyarakat –secara umum- relasi tersebut cenderung bias gender dan dianggap sebagai realitas sakral yang sesuai amanah hadis. Tragisnya, masyarakat menerima kondisi ini tanpa sikap kritis dan *reserve*.

Karenanya, ada beberapa riset yang mencoba menelaah serta mengurai secara detail hadis “keperempuanan”. Seperti riset Muhtador (2017) yang menyimpulkan, perlu ada pembacaan ulang terhadap hadis misoginis melalui kaca mata gender dengan fokus pada ideal-moral; atau riset Zailani, dkk (2016) menyarankan mengkaji ulang hadis misoginis. Hal ini bisa dikatakan sebagai langkah progresif untuk menemukan pesan sakral teks-teks keagamaan. Posisi inilah yang mendorong UINM dan UMM menempatkan hadis pada posisi strategis serta tumpuan utama. Oleh karenanya, sistem pendidikan yang diterapkan senantiasa difokuskan pada pembangunan interaksi edukasi humanis, egaliter, dan progresif berlandaskan pada nilai filosofis (hadis).

Fakta yang cukup menarik, adanya upaya reaktualisasi hadis yang bernada misoginis di kalangan UINM dan UMM. Salah satu yang diinterpretasi ulang adalah hadis yang

menerangkan tentang ketidaksempurnaan akal dan agama perempuan; dan hadis lain menceritakan tentang posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Karenanya, pihak UINM dan UMM berupaya mendamaikan pesan literasi-skriptual hadis dengan konteks dan spirit zaman saat ini. Tidak heran jika mereka terus menerus melakukan proses penyegaran kebekuan tafsir teks-teks keagamaan tentang perempuan. Mereka paham jika hadis perlu ditempatkan sebagai tuntunan normatif terhadap posisi perempuan tanpa melepas kontekstualitas kelahirannya (*asbāb al-wurūd*). Pada konteks inilah, UINM dan UMM memiliki pemikiran kritis bahwa dari aspek waktu, hadis yang misoginis perlu dilihat kembali konteksnya. Salah seorang tenaga pengajar memberikan contoh tentang hadis yang misoginis bahwa “akal dan agama perempuan tidak sebanding dengan laki-laki”. Hadis ini disampaikan ketika Nabi Muhammad memberikan petuah kepada komunitas perempuan sesudah salat hari raya. Tenaga pengajar UMM ini sadar sejarah, jika pada era Nabi Muhammad seluruh persoalan keumatan terlebih lagi problematika sosio-religius –termasuk permasalahan perempuan- langsung dikonsultasikan kepada Nabi Muhammad.

Dari kesadaran sejarah inilah, UINM dan UMM kritis terhadap lingkup realitas sosial yang melingkupi teks-teks hadis. Terlebih ketika pesan normatif hadis melebur dan menyatu dengan realitas kesejarahan, otomatis ia diterima oleh masyarakat dalam ruang sosio-budayanya. Apalagi secara teoretis, konsultasi langsung kepada Nabi Muhammad memiliki peluang mendapatkan penjelasan-penjelasan konkret. Setiap perkara yang muncul diputuskan menggunakan asas keadilan, sehingga tidak menuai permasalahan baru di masyarakat

termasuk masalah perempuan (Musa, 2014:69). Namun ada tenaga pengajar UINM secara kritis menyatakan, apakah mungkin Nabi Muhammad sebagai seorang yang berakhhlak mulia, yang oleh Siti Aisyah dikatakan perilaku Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, menutup mata dan telinga ketika menghadapi problematika perempuan yang merupakan bagian dari umat Islam? Atau pertanyaan sivitas akademika UMM, apakah Nabi Muhammad dalam menghadapi problematika perempuan perlu menjatuhkan harkat, martabat dan merendahkan nilai keagungan kepribadian perempuan?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi sikap kritis dari UINM dan UMM yang muncul berdasarkan pada kesadaran kemanusiaan sebagai insan akademik. Faktanya, realitas sosial kependidikan yang humanis dan non-diskriminatif di UINM dan UMM tumbuh berkembang dari embrio kesadaran keberagamaan. Kesadaran inilah yang memposisikan sikap sivitas akademika untuk lebih kritis terhadap konstruksi realitas keberagamaan. Hadis pada konteks inilah yang dapat dilihat secara holistik melalui kacamata egaliter, sehingga mereka mampu menempatkan relasi laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai dan norma keagamaan Islam. Melalui pemahaman yang proporsional antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka, UINM dan UMM membingkai sistem pendidikannya lebih progresif dan kontributif. Hal ini bisa dilihat dari interaksi edukatif yang ada tidak tersekat oleh gender dan/atau mereka bahkan lebih saling berkompetisi.

Di sisi yang lain, interpretasi teks-teks hadis yang dilakukan UINM dan

UMM melampaui literasi skriptual yang tersurat. Salah satunya adalah hadis yang menceritakan tentang "kekurangan akal dan agama perempuan". Tenaga pengajar UMM menyatakan, jika diperhatikan kepada siapa hadis itu ditujukan, jelas ditujukan kepada para jama'ah perempuan kota Madinah yang mayoritas kaum Ansar. Mereka, menurut Nasution (2013) secara umum dikenal berhati lembut, penuh pertimbangan, dan cerdas berpikir. Hal ini dimungkinkan pengaruh kondisi geografis Madinah yang merupakan wilayah pertanian subur dengan hasil pertanian melimpah ruah, dan suhu tropis tidak terlalu panas seperti Mekkah. Ada juga kalangan yang mendeskripsikan bahwa masyarakat Madinah hidup pada masa Nabi Muhammad terkenal dengan masyarakat religius, moderat (menghindari perilaku ekstrem), dan mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas (Ali, 2017).

Bahkan sivitas akademika UINM dan UMM juga memahami pada sisi negatif kaum perempuan yang tidak bisa dinafikan adanya. Mereka meyakini adanya dimensi tertentu yang tidak dimiliki oleh para perempuan, sehingga perlu ada sikap selektif terhadap realitas tertentu. Sebagaimana perempuan Muahajirin ketika mencontoh perilaku dari perempuan Ansar, yang tergambar pada ucapan Umar bin Khattab bahwa "tatkala kamu sampai di Madinah, akan kamu temukan suatu kaum yang lebih dominan yaitu kaum perempuannya. Lalu perempuan-perempuan kami meniru adab dan perilaku orang-orang Ansar". Artinya, ada sisi "lain" pada kehidupan perempuan Ansar untuk di telaah secara selektif; atau memang perilaku kaum Muahajirin yang memiliki tradisi dan budaya berbeda, sehingga ketika kaum perempuan Muahajirin

meniru gaya kehidupan kaum perempuan Ansar bakal terjadi ketegangan pemahaman. Penyesuaian itu juga pernah dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah dengan pendekatan komunikasi antarbudaya (Anas & Adinugraha, 2017). Pola ini yang digarisbawahi oleh UINM dan UMM ketika melakukan penafsiran kontekstual teks-teks hadis yang misoginis, sehingga mereka yakin selektivitas terhadap situasi, keadaan, dan karakter dominan masyarakat sangat penting.

Menariknya juga, UINM dan UMM dalam melakukan interpretasi teks-teks hadis melalui struktur ketatabahasaan atau bentuk susunan *naṣ (matan)*. Upaya ini dilakukan dengan melihat hadis menggunakan kata-kata yang tidak berbentuk taqriri (ketetapan) atau mungkin ia tersusun menggunakan bentuk penyampaian yang bersifat kelaziman. Mereka mengasumsikan bahwa ada hadis yang mengungkapkan rasa kekaguman terhadap realitas, seperti hadis yang mengungkap kurangnya akal dan agama perempuan. Hadis ini, menurut tenaga pengajar UMM, merupakan bentuk kekaguman Nabi Muhammad terhadap kontradiksi yang terjadi di Madinah pada waktu itu, yaitu posisi dominannya kaum perempuan daripada laki-laki. Padahal mereka ( kaum perempuan) merupakan kaum yang relatif lemah dibandingkan laki-laki yang memiliki sifat tegas, tetapi ia lebih dominatif atas kaum laki-laki di masyarakat. Kondisi dominatif tidak serta merta memantik pemikiran untuk tidak kritis terhadap realitas tersebut. Oleh karenanya, tenaga pengajar UMM tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad kagum terhadap kekuasaan Allah yang telah menempatkan kekuatan pada tempat yang di duga lemah; atau sebaliknya Allah bisa memperlihatkan

kelemahan di tempat yang diasumsikan kuat. Lazim apabila sivitas akademika UMM tersebut mempunyai kesimpulan bahwa sengkarut posisional dalam pandangan dirinya memunculkan kekaguman pada sosok Nabi Muhammad.

Tidak berlebihan jika aktivis dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) di UMM dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di UINM mempunyai pandangan bahwa hadis tersebut dianggap sebagai bentuk kekhususan (spesifik) dinamika keperempuanan di Madinah. Salah satu kalimat yang dapat dijadikan rujukan normatif terhadap realitas tersebut adalah ungkapan “yang kurang akal”. Pada percikan ungkapan ini, mereka memaknai sebagai ungkapan menarik perhatian sekaligus introduksi halus dalam menyampaikan nasihat-nasihat keumatan, khususnya terhadap kaum perempuan yang baru memeluk Islam –pada konteks Madinah. Pemilihan kalimat (susunan kata) yang tepat, mudah dicerna, tidak menyinggung perasaan, dan santun merupakan kerangka ajaran Islam yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Bahkan para aktivis tersebut yakin jika pemilihan kata memiliki keagungan manfaat seperti terintegrasi pada sikap Nabi Muhammad yang tujuannya untuk menjaga hubungan sosial dengan para komunikator (metakomunikasi).

Berdasarkan kerangka tersebut, sivitas akademika UINM dan UMM menjunjung dan mengedepankan kesantunan komunikasi antar personal sebagai cerminan kepribadian religius, humanis, toleransi, dan egaliter. Mereka meyakini landasan sikap kesantunan ada dalam QS. *Tāhā* [20]:44 dan QS. *an-Naḥl* [16]:125 yang mensinyalir laki-laki harus berperilaku lemah lembut terhadap

perempuan termasuk ketika ia membantah perempuan. Pun begitu komunikasi antara mahasiswa dan mahasiswi terdapat relasi interaktif egaliter serta kompetitif sportif menggapai prestasi gemilang. Riset Liu, dkk. (2018) pun menyatakan, bahasa mampu mempengaruhi sikap individu tentang kesetaraan gender.

Menariknya pula ada pemikiran kritis sivitas akademika UINM pada hadis tentang “kurang akal”. Mereka menilai hadis ini tidak disampaikan secara spesifik dalam bentuk ketetapan yang ditegaskan nabi, baik di hadapan perempuan maupun kaum laki-laki. Karenanya, yang perlu digarisbawahi adalah ketika Nabi Muhammad ditanya maksud dari frase “kurang akal” menunjuk pada perkara yang jelas, yaitu kurang salat dan puasa pada saat-saat tertentu ketika perempuan mengalami haid dan nifas. Mereka memahami sekat kekhususan yang tidak bisa melegitimasi secara general keberlakuan hadis misoginis tersebut.

Karenanya, frase “kurang akal” diyakini sivitas akademika UINM dan UMM bukan sesuatu yang lepas dari kodrat, tetapi ia merupakan sesuatu yang istimewa dan melekat kuat dalam diri perempuan secara biologis. Karenanya ia bersifat alamiah sebagai “pemberian Tuhan” yang tidak dapat di tukar sesuai dengan keinginan diri manusia. Lazim apabila muncul kesadaran di atas pentas dua PT di Malang bahwa jika “kekurangan” tersebut tidak ada dalam diri perempuan, maka bisa jadi mereka lepas dari kodrat kemakhlukan sosok keperempuanannya. Jelasnya, kekurangan diri perempuan bukan sesuatu yang diupayakan untuk diwujudkan oleh perempuan; terlebih lagi untuk menjadi pilihannya. Sivitas akademika UINM sendiri pun sadar jika kekurangan tersebut

bukan bersifat general dan permanen, tapi ia parsial yang terbatas pada aspek ibadah saja. Artinya, dimensi ibadah yang pada saat-saat tertentu tidak dapat dilakukan oleh perempuan, bukan termasuk kecacatan untuk dirinya.

Untuk itu bisa dikatakan, “kurang akal” bukan monopoli milik laki-laki atau perempuan tapi milik bersama (kolektif). Di UINM dan UMM sendiri sangat lumrah ditemui mahasiswi memasuki fakultas yang mainstream milik laki-laki seperti fakultas teknik atau pertanian; hal ini sangat berbeda dengan di Cina yang pendidikannya sangat bias gender (Liu & Li, 2010). Bahkan dapat dilihat dari aspek sejarah, banyak dari kalangan perempuan yang mampu mencapai posisi sejajar atau melebihi capaian laki-laki, seperti prestasi Siti Maryam, Ratu Balqis, Rabi’ah Adawiyah, Asiah (istri Fir’auh), Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Dapat disimpulkan berdasarkan data faktual dan dari dimensi historis bahwa nilai normatif keagamaan (Islam) tidak membatasi kiprah perempuan di ruang publik seperti di dunia pendidikan. Walaupun ada riset Edelman, dkk. (2018) menunjukkan, perusahaan yang dipimpin perempuan kurang mendapat legitimasi.

UINM dan UMM cenderung memaknai hadis misoginis terutama yang memiliki frase “kurang akal” ditafsirkan dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, kurangnya kemampuan akal mengingat kondisi perempuan bangsa Arab dulu tidak terdidik dan terjajah dalam budaya patriarki; dan *Kedua*, kurangnya aktivitas akal sebab saat itu sangat langka perempuan yang memiliki kemampuan untuk berkreasi. UINM dan UMM yang berhaluan keberagamaan progresif membuka ruang lebar bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri mereka berimprovisasi, berkreasi, dan

berkarya dengan batas-batas etika Islam. Hadis misoginis oleh sivitas akademika UINM dan UMM ditafsirkan secara kontekstual dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang dijunjung Islam, yaitu humanis, emansipatoris, dan monoteistik. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat perempuan baru mendapatkan kebebasan hidup dan penghargaan sejak Muhammad dinobatkan sebagai utusan, maka perempuan tidak hanya berdiri sebagai objek tapi juga subjek atas kehidupan di muka bumi ini. Wajar jika muncul pernyataan visioner dari kalangan PT di Malang tersebut, tidak etis apabila menggeneralisir satu keadaan dengan hanya memperhatikan satu jenis dan mengesampingkan jenis lain. Seharusnya untuk melakukan generalisasi pada aspek kemakhlukan, maka perlu ada landasan teologis, psiko-biologis, dan fakta konkret sebagai bukti atas kelemahan kodrat sosok perempuan.

### **Kaldera Egaliter Religius**

Dari deskripsi tersebut sangat jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki relasi sepadan dengan kodrat kemakhlukan yang dimilikinya terutama pada keseimbangan akal (*reason*) dan keberagamaan. Munculnya postulasi ini tidak lepas dari runtuhnya kegagahan sistem patriarki yang memenangkan posisi laki-laki atas perempuan. Ibarat jatuhnya tanah akibat letusan vulkanik, maka postulasi tersebut merupakan kaldera (fitur vulkanik) yang terbentuk sebagai implikasi. Kaldera egaliter terkonstruksi digunakan sebagai tempat darma wisata melakukan *refreshing* terhadap kejumudan relasi dan interaksi yang timpang. Lazim jika sikap humanis-egaliteristik berbasis nilai-nilai keberagamaan terinternalisasi dalam diri

sivitas akademika UINM dan UMM yang melahirkan kesadaran emansipatoris. Tanpa tata kelola sistem pendidikan egaliter akan sulit memberikan contoh konkret pada sivitas akademika. Artinya, perlu ada pengelolaan pendidikan berbasis wahyu (*ayat qauliyyah*) yang berbalut realitas empiris (*ayat kauniyyah*) dengan menumbuhkan potensi kemanusiaan religius non diskriminatif.

Dalam diri umat Islam sendiri, ada salah satu sumber daya yang tidak bisa lepas, yaitu: keinginan dirinya untuk mengkaji, menelah, dan mengembangkan pendidikan yang mampu melahirkan manusia unggul dengan berpegang teguh pada wahyu dan nalar (Assegaf, 2011:2). Karenanya, keinginan ini merupakan bentuk kemutlakan di ranah teoretis atau aplikasi; dari ranah teologis, filosofis, hingga yang rasional-empiris. Al-Qur'an dan hadis sendiri bisa mengkerangkai seluruh tindakan masyarakat yang bermuara pada pandangan, sikap, dan tujuan hidup yang diyakini sebagai nilai etik-normatif. Diharapkan pula teks wahyuistik tersebut menginspirasi serta memicu adanya tindakan humanis dan liberalis melawan ketidakadilan terhadap perempuan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik (Rahbani & Sharepour, 2015), hukum (Suhra, 2013), dominasi budaya, diskriminasi gender (Campero & Fernandez, 2019; Hafid, 2014), dan kekerasan seksual (Davies & True, 2017). Memang teks-teks wahyu mampu melahirkan transformasi sosio-religius di pranata sosial (lembaga pendidikan).

Oleh karenanya, runtuhnya singgasana patriarki yang memunculkan pola baru interaksi non-diskriminasi berbasis religius –oleh peneliti diistilahkan kaldera egaliter religius- membawa spirit baru. Pada saat ini pun, ketika masyarakat telah memasuki era revolusi industri 4.0 tidak mengubah

spirit transformasi sosio-budaya kehidupan perempuan; hal ini juga disinyalir dalam riset Yunailis (2019) yang mengurai tentang pergumulan perempuan dengan internet. Walaupun, ada pandangan keagamaan konservatif yang lahir dari pemahaman bias gender serta meletakkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Secara umum, hak-hak perempuan telah mendapat signifikansi yang kuat pada saat ini, dan khususnya di PT seperti di UINM dan UMM. Namun, secara historis perempuan masih juga tersubordinasi oleh laki-laki dan dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”. Meski demikian, seluruh pandangan *stereotype* berubah sangat cepat, sejak adanya proses liberalisasi perempuan yang memperoleh signifikansinya, terutama pasca Perang Dunia kedua (Engineer, 2003:1). Kecuali *stereotype* gender yang didasarkan pada budaya akan sulit untuk diubah, seperti kesimpulan riset Myklebust (2019).

Sedangkan penafsiran teks-teks wahyu yang proporsional melegitimasi kemaslahatan perempuan. Kenyataannya pun agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Artinya, penafsiran terhadap agama perlu melihat dan mendengar realitas kehidupan manusia untuk diarahkan sesuai dengan kehendak-kehendak agama, yaitu kebaikan atau kemaslahatan (Nuruzzaman, 2005:178). Serta di sisi yang lain, perlu mengedepankan asas keadilan dan kesepadan untuk melihat fenomena sosial kemasyarakatan terutama dinamika pada relasi edukasi antarlaki-laki dan perempuan di PT; dalam riset Weng (2019) dikatakan agama perlu dipandang sebagai spektrum. Landasan etik inilah ditanamkan dalam diri subjek sistem kemasyarakatan dan peradaban umat Islam melalui pembangunan pilar-pilar penyanggah, yaitu pendidikan

(Islam). Pendidikan Islam sendiri memiliki ciri khas dengan karakteristik islami yang terikat dengan nilai-nilai profetis yaitu nilai humanis, liberalis, dan transendensi. Jelasnya, tata kelola sistem pendidikan yang ada di UINM dan UMM memiliki spirit profetis yang menumbuhkan kesadaran keberagamaan yang militan.

Dari kerangka tersebut, sistem pendidikan berbasis nilai humanis-egaliter bisa diklasifikasikan pada tiga varian, yaitu: *Pertama*, pendidikan gender islami, yakni pendidikan yang dikembangkan dari nilai Al-Qur'an dan hadis melalui perspektif wawasan kesetaraan gender. Dalam pengertian ini, pendidikan bisa berwujud pemikiran filosofis –atau berupa kependidikan gender- yang dibangun dari hasil interpretasi teks-teks wahyu (Al-Qur'an dan hadis) dan rasional-empiris. *Kedua*, pendidikan gender keislaman, yakni upaya melakukan pendidikan nilai-nilai gender sesuai doktrin Islam agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan dapat berwujud, antara lain: a) Segenap kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan tinggi untuk membantu seseorang dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai humanis-egaliter antarlaki-laki dan perempuan sesuai dengan doktrin Islam; dan b) Suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang memiliki dampak tertanamnya nilai-nilai humanis-egaliter antarlaki-laki dan perempuan sesuai tuntunan doktrin Islam. *Ketiga*, pendidikan gender dalam Islam, yakni berupa proses penyelenggaraan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai humanis-egaliter yang berlangsung di atas pentas sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam dalam konteks ini diartikan sebagai laju perjalanan masyarakat Islam dilihat

dari perspektif gender sejak zaman Nabi Muhammad sampai saat ini. Jadi, pada pengertian ketiga inilah istilah pendidikan gender dalam Islam dapat dipahami sebagai pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai gender sesuai doktrin Islam, sehingga menjadi bagian dari budaya dan peradaban umat Islam di sepanjang sejarahnya.

Dari tiga konsep tersebut yang paling esensial menginternalisasikan nilai normatif gender adalah yang bersumber dari teks-teks wahyu, selaras dengan realitas empiris (kontekstual) dan rasional. Sehingga ia mampu mewujudkan kesadaran keagamaan berdasarkan realitas empiris di PT –baca di masyarakat- dan akal sehat masyarakat. Namun, secara konseptual kerangka material dari sistem pendidikan egaliter tidak mampu mengembangkan kaldera egaliter religius, jika tidak diimbangi dengan nilai humanis, toleransi, dan non diskriminatif (egaliter) yang bersumber dari Islam. Karenanya, karakteristik-karakteristik tertentu yang ada dalam sistem pendidikan dapat dideskripsikan, antara lain: *Pertama*, pada dasarnya pendidikan gender keislaman bukan upaya mewariskan paham gender berbasis keagamaan tertentu, melainkan menekankan pada proses agar sivitas akademika memperoleh kemampuan metodologis untuk bisa memahami fenomena relasi egaliter antarlaki-laki dan perempuan sesuai doktrin Islam. *Kedua*, pendidikan gender keislaman tidak terpaku pada romantisme yang berlebihan melihat sejarah perempuan masa Nabi Muhammad dengan penuh emosional, akan tetapi ia diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kompetensi untuk berpikir proyektif serta visioner dalam menyikapi fenomena relasi bias gender atau pada tindakan *stereotype* terhadap perempuan.

*Ketiga*, material pengajaran gender keislaman diintegrasikan dengan upaya mengembangkan kesadaran keberagamaan dan kepedulian sosio-budaya yang mendorong sivitas akademika memiliki kompetensi untuk mempersepsikan secara kritis realitas keperempuanan. Persepsi kritis ini perlu berlandaskan pada nilai teologis –baca Al-Qur'an dan hadis- yang tertanam dalam diri sivitas akademika sebagai tolok ukur kebenarannya. Di satu sisi, persepsi tersebut akan mengembangkan wawasan emansipatoris di PT, sehingga sivitas akademika mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensi metodologisnya untuk menelaah esensi doktrin agama Islam dan realitas keperempuanan. *Keempat*, pendidikan gender keislaman perlu diarahkan pada penanaman dan pengembangan emosional keagamaan yang bernuansa kesetaraan gender. Dari ranah ini diharapkan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan perilaku terpuji dilingkungan kampus, sehingga sivitas akademika memiliki kemampuan menggunakan doktrin Islam sebagai sistem makna atau paradigma dalam rangka mendefinisikan fenomena gender dari sudut refleksi kesadaran keberagamaan dan pengetahuannya. Tindakan ini juga pernah dilakukan di kalangan warga Amerika-Somalia di Columbus, Ohio (al-Huraibi, 2017).

Pada konteks inilah, sistem pendidikan yang egaliter memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pemahaman keagamaan. Sebab melalui model dan contoh yang konkret, sivitas akademika bisa melihat dan menelaah secara empiris. Hal ini perlu ada di dalam masyarakat terutama masyarakat yang menggunakan sistem patriarki-paternalistik seperti

ketokohan kyai –lihat kasus rekonsiliasi sosial- (Wardi, 2019), kepemimpinan di lembaga pendidikan (Umiarso & Muhith, 2019; Umiarso, 2018), dan pembangunan kesadaran sejarah (Firdaus, dkk., 2018); namun kenyataannya kepemimpinan perempuan –seperti nyai- yang masih menempati posisi kedua (Zakiyah, 2016). Karenanya, sistem pendidikan gender keislaman bisa dimaknai sebagai tata sistem atau material kependidikan gender. Namun operasionalisasi sistem pendidikan ini lebih difokuskan pada pemberdayaan perempuan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam konteks tertentu. Jelasnya, sistem pendidikan ini tidak hanya menyangkut aspek normatif doktrin Islam, tetapi juga diimplementasikan dalam ragam materi, kelembagaan, dan norma-nilai budaya yang berdampak pada pemberdayaan perempuan. Seperti simpulan riset Tyrie & Beauchamp (2018) bahwa sosialisasi *stereotype* gender yang dilakukan dari masyarakat terhadap anak-anak bertujuan untuk dapat keluar dari tindakan bias gender. Jadi, sikap inilah yang meruntuhkan sistem patriarki yang bias gender, sehingga kaldera egaliter religius terbentuk menjadi kawah pemberdayaan perempuan.

Melalui kaldera egaliter religius tersebut, maka pemberdayaan perempuan dapat direpresentasikan dalam bentuk interaksi egaliter. Bahkan ia akan memiliki pengaruh terhadap pengembangan dimensi rasional, emosional, dan spiritual sivitas akademika secara integratif, seimbang, dan selaras, sehingga menyemai benih kebahagiaan dan kesejahteraan dunia-akhirat. Salah satu buktinya adalah religiusitas perempuan yang semakin tumbuh di tengah komunitas sekuler (Baker & Whitehead, 2016). Karenanya, pandangan dan pengaktualisasi pendidikan

egaliter yang menyeluruh terhadap semua elemen kehidupan laki-laki dan perempuan akhirnya akan mewujudkan adanya keseimbangan relasi edukatif. Sebagai implikasinya, usaha mengembangkan dan membina seluruh aspek dan potensi yang ada pada diri manusia akan berjalan seimbang.

## **PENUTUP**

Munculnya paham keagamaan sivitas akademika yang egaliter, progresif, dan kontekstual tidak lepas dari sistem pendidikan yang dipraktikkannya. Polanya bisa dilihat ketika melakukan interpretasi teks-teks hadis misoginis yang cenderung melampaui literal-skriptual. Karenanya, sistem pendidikan yang akan teraktualisasi dan terintegrasi antara dimensi realitas empirik (*ayat kauniyyah*) dan wahyu normatif (*ayat qauliyyah*). Implikasinya, sistem pendidikan di PT tidak menyangkut aspek doktriner keislaman yang "melangit" saja, tapi juga "membumi" dalam bentuk materi perkuliahan, kelembagaan, serta norma dan nilai sosio-budaya. Semua ini bermuara pada pemberdayaan perempuan yang berasaskan pada nilai humanis, emansipatoris, dan moderat atau berbasis pada nilai profetik (humanis, liberalis, dan transendental).

Hal ini meruntuhkan keperkasaan patriarki dan memunculkan kaldera egaliter religius sebagai jawaban atas sistem pendidikan yang bias gender. Dalam kaldera ini ada sikap humanis dan non diskriminatif masuk ke sistem pendidikan yang mendorong PT mampu mengangkat harkat derajat perempuan. Bahkan ia mampu mereproduksi kultur akademik yang kompetitif antara laki-laki dan perempuan untuk lebih progresif dan moderat dalam

berelasi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terakhir pada konteks ini, peneliti sampaikan terima kasih kepada beberapa informan yang telah memberikan informasi atau data yang menjadi bahan analisis utama dari riset ini, walaupun tidak bisa menyebutkan satu persatu informan tersebut. Namun, peneliti merasa sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap riset ini. Akhirnya, peneliti memohon kepada

Allah semoga selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada peneliti dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Semoga kita nantinya dijadikan insan yang bisa mengambil manfaat atas semua yang telah dikaniankan Allah kepada kita dan dapat mempergunakan sesuai perintah-Nya. Tak lupa, rasa terima kasih peneliti juga diucapkan kepada segenap mitra bestari yang akan banyak memberikan masukan guna perbaikan tulisan artikel ini, serta pemimpin redaksi Jurnal Penamas dan segenap anggota redakturnya yang akan menerbitkan artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Arimbi, D. A. (2009). *Reading Contemporary Indonesia Muslim Women Writers: Representation, Identity and Religion of Muslim Women in Indonesia Fiction*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Assegaf, A. R. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan*, Penerj.: Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS.
- Kirtsoglou, E. (2004). *For The Love of Women: Gender, Identity and Same-Sex Relation in a Greek Provincial Town*. London: Routledge.
- Kuntjara, E. (2003). *Gender: Bahasa dan Kekuasaan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Musa, A. M. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Responss Islam terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Serambi.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kyai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wadud, A. (2013). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. London: Oneworld Publications.

#### **Artikel**

- Abdullah, M. & Sapiei, N. S. (2018). "Do Religiosity Gender, and Educational Background Influence Zakat Compliance?, The Case of Malaysia". *International Journal of Social Economics* 45(8), 1250-1264.

- Adinugraha, H. H., Maulana, A.S. & Sartika, M. (2018). "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17(1), 42-62.
- al-Huraibi, N. (2017). "Navigating the Cultural Divide: Islam, Gender, and The Integration of Somali Immigrants". *Sociology of Islam* 5(1), 56-93.
- Ali, U. S. (2017). "Peradaban Islam Madinah: Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj". *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 15(2), 191-204.
- Anas, A. & Adinugraha, H. H. (2017). "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya". *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11(1), 53-72.
- Aune, K. (2014). "Feminist Spirituality as Lived religion: How UK Feminists Forge Religion-Spiritual Lives". *Gender & Society* 29(1), 122-145.
- Baker, J. O. & Whitehead, A. L. (2016). "Gendering (Non) Religion: Politics, Education, and Gender Gaps in Secularity in the United State". *Social Forces* 94(4), 1623-1645.
- Campero, S. & Fernandez, R. M. (2019). "Gender Composition of Labor Queues and Gender Disparities in Hiring". *Social Forces* 97(4), 1487-1516.
- Cholil, M. (2017). "Complexities in Dealing with Gender Inequality: Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia". *Journal of Indonesian Islam* 11(2), 423-458.
- Darwin, H. (2018). "Redoing Gender, Redoing Religion". *Gender & Society* 32(3), 348-370.
- Davies, S. E. & True, J. (2017). "Connecting the Dots: Pre-existing Patterns of Gender Inequality and the Likelihood of Widespread and Systematic Sexual Violence". *Global Responsibility to Protect* 9(1), 65-85.
- Eastwood, A. L. (2018). "A Tribe of Roaring Girl: Crime and Gender in Early Modern England". *Exploration in Renaissance Culture* 44(2), 202-219.
- Edelman, L. F., Donnelly, R., Manolova, T. & Brush, C. G. (2018). "Gender Stereotypes in the Angel Investment Process". *International Journal of Gender and Entrepreneurship* 10(2), 134-157.
- Fauziah, S. & Rohman, M. (2012). "Pendidikan Seks dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional: Telaah di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten". *el-Hikam: Journal of Education and Religious Studies* 5(1), 1-28.
- Firdaus, A. H., Purnomo, A., & Ahmad, T. A. (2018). "Kesadaran Sejarah Siswa Terhadap Ketokohan dan Ketauladan Sunan Kudus di MA Qudsiyyah Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018". *Indonesia Journal of History Education* 6(2), 150-161.
- Glas, S., Spierings, N. & Scheepers, P. (2018). "Re-Understanding Religion and Support for Gender Equality in Arab Countries". *Journal Gender & Society* 32(5), 686-712.

- Hadi, S. (2014). "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia". *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7(1), 25-46.
- Hafid, M. (2014). "Islam dan Gender". *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1(1), 19-34.
- Ismail & Wardi, M. (2019). "Peran Kyai dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal di Bujur Tengah Pamekasan Madura". *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 17(1), 128-152.
- Khattab, F. (2018). "Gender and Sexuality in Islamic Teachings vs. Human Rights 2017: A Literatur Review". *Portuguese Journal of Political Science* 9, 73-88.
- Kull, A. (2012). "Gender Awareness in Islamic Education: The Pioneering Case in Indonesia in a Comparison with Pakistan". *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 19(3), 397-435.
- Liu, A. H., dkk. (2018). "Linguistic Origins of Gender Equality and Women's Right". *Gender & Society* 32(1), 82-108.
- Liu, B. & Li, Y. (2010). "Opportunities and Barriers: Gendered Reality in Chinese Higher Education", *Frontiers of Education in China* 5(2), 197-221.
- Maksum, A. (2015). "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1), 81-108.
- Muhtador, M. (2017). "Analisis Gender: Membaca Perempuan dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)". *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2(1), 59-72.
- Mustaqim, M. (2014). "Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Perspektif Gender". *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9(1), 113-128.
- Myklebust, R. B. (2019). "Resistance and Persistence: Exploring Gender-Untypical Educational Choices". *British Journal of Sociology of Education* 40(2), 254-268.
- Nasution, F. (2013). "Rasulullah SAW sebagai Shahibul Dakwah: Analisis Sejarah Dakwah pada Masa Rasulullah SAW.". *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 7 No. 1 (2013): 136-156.
- Okon, E. E. (2013). "The Status of Woman in Islam". *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 10(2), 21-27.
- Purwanto, T. (2019). "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia". *Palastren: Jurnal Studi Gender* 12(1), 31-64.
- Rahbari, L. & Sharepour, M. (2015). "Gender and Realisation of Women's Right to the City in Tehran". *Asian Journal of Social Science* 43(3), 227-248.
- Rahman, Y. (2017). "Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation of Gendered Verses and the Quran-Based Activism". *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55(2), 293-326.

- Ramli, M. A., Rosele, M. I., Ariffin, M. F. M. & Zulkepli, M. I. S. (2018). "Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender atau Huraian Pseudo-Ilmiah". *Journal of Ma'alim Al-Qur'an wa al-Sunnah* 14(1), 81-90.
- Suhra, S. (2013). "Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Jurnal al-Ulum* 13(2), 373-394.
- Suryorini, A. (2012). "Menelaah Feminisme dalam Islam". *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7(2), 21-36.
- Susanto, E. (2006). "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural: Upaya Strategis Menghindari Radikalisme". *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 9(1), 782-789.
- Tyrie, J. & Beauchamp, G. (2018). "Children's Perceptions of Their Access to Rights in Wales: The Relevance of Gender and Age". *The International Journal of Children's Rights* 26(4), 781-807.
- Umiarso & Muhith, A. (2019). "Construction Organizational Culture in Gender Pesantren Through Kyai's Transformational Leadership". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 24(1), 67-94.
- Umiarso. (2018). "Kepemimpinan Transformasional Profetik dalam Mengembangkan Pesantren di Kabupaten Jember". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23(1), 87-106.
- Umiarso. (2019). "The Multicultural Education in The Walisongo Modern Islamic Boarding School (Pesantren Modern)". *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslamian* 14(1), 47-72.
- Weng, E. (2019). "Through National Lens Darkly: Religion as a Spectrum". *Journal for the Academic Study of Religion* 32(1), 3-26.
- Yunailis, M. (2019). "Internet Perempuan Salafi: Ruang Interaksi dan Ekspresi". *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 32(2), 267-280.
- Zailani, Bay, K. & Chalida, S. (2016). "Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Gender dalam Perspektif Fiqih Hadis". *Jurnal Ushuluddin* 24(1), 37-50.
- Zakiyah. (2016). "Female Leadership in Indonesia Pesantren". *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 29(2), 199-210.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Filsafat Tafsir". *Harian Republika*, Jum'at 21 Oktober 2016.
- Zuhriy, M. S. (2011). "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19(2), 287-310.
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3(1), 1-11.

